

BAB III

KONTRIBUSI KAUM MUDA INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

A. Terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)

Sajak tahun 1963-1964 bangsa Indonesia mengalami krisis yang menyebabkan rakyat Indonesia gelisah dan bingung, yang menimbulkan akibat-akibat fisik disintegrasi sosial-ekonomi dalam skala yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Kekacauan pada tahun 1965-1966 lebih dapat disaksikan saat ini seperti Berjuis kehidupan rakyat biasa relatif terisolir karena hanya membandingkan dan membaca angka statistik kemiskinan dan mati karena kelaparan.¹

tanggal 8 Oktober tahun 1966. Para pemuda anti komunis kini menguasai jalan-jalan, dan membakar markas besar PKI di Jakarta. Pada akhir bulan Oktober tahun 1966, para mahasiswa anti PKI membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan dukungan dan perlindungan tentara. KAMI berintikan kelompok pemuda Islam, Katolik dan mantan PSI. Front kesatuan pelajar yang sama disebut KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia), dan front alumni Universitas, KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dibentuk pada awal tahun 1966. Kedua front yang terakhir ini berintikan simpatian Masyumi-PSI. Sementara itu, penahanan masih terus berlangsung lebih dari 10.000 aktivis dan pemimpin PKI telah diculik di

¹ Onghokham, *Soekarno Orang Kiri Revolusi dan G-30-S 1965*, (Depok; Komunitas Bambu, 2013), p. 156

Jakarta dan Jawa Barat pada bulan Desember 1965, diantara mereka adalah Pramoedya Ananta Toer.²

Atas prakarsa Prof. Dr. Syarip Thayeb Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengtahuan) dibentuklah organisasi gabungan mahasiswa dari 17 ormas mahasiswa di Jakarta yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).³ KAMI lahir ditengah-tengah terjadinya dualisme ormas kemahasiswaan akibat adanya nasakomisasi dunia kemahasiswaan yang tepusat pada Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang merupakan federasi dari ormas-ormas mahasiswa eksternal Universitas dan Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI) yang merupakan gabungan dewan-dewan mahasiswa intra Universitas, dimana kedua organisasi tersebut dikuasai oleh kelompok mahasiswa kiri.

Untuk mempertanggungjawabkan atas inpotenya kedua federasi organisasi mahasiswa tersebut dan mendobrak dualisme dikalangan dua organisasi mahasiswa KAMI. KAMI lahir untuk menghimpun mahasiswa anti komunis terutama organisasi mahasiswa ekstra Universiter. Dalam pada itu, Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI) mengadakan kongres bertempat digedung (Ikatan Dokter Indonesia) IDI di Jalan Sam Ratulangi Jakarta Pusat, dengan acara tunggal pembubaran PPMI. Kongres PPMI yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember

² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), pp.594-595.

³ Soegiarso Soerejo, *G-30-S/PKI dan Apa Peran Bung Karno Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* (Jakarta: PT. Rola Sinar Perkasa, 1988), pp.262-263.

tahun 1965 memutuskan menerima secara aklamasi pembubaran PPMI.⁴ program perjuangannya ada tiga macam, yaitu:

1. Bubarkan PKI dan Ormas-ormas yang bernaung dibawahnya.
2. Bersihkan Kabinet Dwikora.
3. Turunkan harga-harga.

Oleh karena tiga tuntutan yang telah ditulis di atas sebenarnya diambil oleh para mahasiswa dari hati nurani rakyat yang tidak buka suara, maka program perjuangan KAMI ini disebut juga Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Aksi mahasiswa tersebut untuk pertama kalinya dilancarkan pada minggu ke 15 sesudah meledak G-30-S. dan yang menjadi sasaran utama ditujukan pada Presidium Kabinet dan DPR-GR. Aksi demonstrasi juga mendatangi Khairul Saleh, yang memegang jabatan menteri bertanggung jawab atas jalannya roda perekonomian Republik Indonesia (RI). Para mahasiswa menuntut agar harga barang-barang yang sudah melangit diturunkan, terutama menuntut penurunan harga minyak bumi dan tarip angkutan. Atas desakan para mahasiswa Menteri Koordinator Urusan Ekonomi itu mengatakan, bahwa ia tidak akan mundur setapakpun mengenai keanaikan harga bensin dan tarip angkutan. Menurut Khairul Saleh, banyak faktor yang menyebabkan naiknya harga-harga diluar faktor-faktor ekonomis.⁵

⁴ Nazwir Abu Nain, *Angkatan 66 dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa "Meluruskan History Bangsa Demi Generasi"* (Jakarta: Cipro Medi, 2011). pp. 73-74.

⁵ Soerejo, *G-30-S/PKI dan Apa Peran Bung Karno Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai...*, p.263.

B. Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA)

Tidak tegasnya sikap Presiden Soekarno dalam menghukum dan menindak Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang pemberontakan berdarah G-30-S telah menimbulkan kemarahan rakyat. Pada tanggal 10 Januari tahun 1966, dengan dikordinasikan oleh KAMI Pusat dan KAMI Jaya, dalam apel besar bertempat di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dihadiri oleh para mahasiswa, pemuda dan pelajar tercetuslah tiga tuntutan Rakyat yaitu bubarkan (Partai Komunis Indonesia) PKI sebagai dalang pemberontakan berdarah G-30-S, Rombak Kabinet dan Turunkan Harga yang dihadiri oleh Komandan RPKAD Kol. Sarwo Edhie Wibowo. Kemudian para mahasiswa mengadakan aksi turun ke jalan menyusuri Jalan Diponegoro menuju Hotel Indonesia (HI) dan terus menuju kantor Waperdam III Chairul Saleh untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa yang telah dirumuskan dalam TRITURA.⁶

Dalam sidang pada tanggal 15 Januari tahun 1966 Presiden Soekarno menuduh aksi-aksi mahasiswa didalangi oleh Nekolim (*Neo-Kolonialisme* dan *Imperialisme*), khususnya oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) Amerika Serikat. Kemudian Presiden Soekarno memberi komando agar membentuk “barisan Soekarno” yang bertujuan untuk mempertahankan kedudukannya dari aksi-aksi yang dirasakan sebagai usaha membuka barisan Soekarno. Pada tanggal 16 Januari tahun

⁶ Naim, *Angkatan 66 dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa 'Meluruskan History Bangsa Demi Generasi' ...*, p.76.

1966 dilancarkan kampanye bahwa barisan-barisan Soekarno bertahan mempertahankan ajaran-ajaran Bung Karno.

Menanggapi hal itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyatakan tetap taat kepada Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI dan memelihara kekompakan sesama ABRI dan kekompakan antara rakyat Indonesia dengan ABRI. Sebelumnya pimpinan Angkatan Darat juga menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah barisan Soekarno, sehingga tidak perlu lagi membentuk barisan Soekarno secara fisik. Dua hari kemudian, Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PPLRADA) Jawa Barat mengeluarkan larangan pembentukan Barisan Soekarno dalam bentuk organisasi apapun di daerah Jawa Barat. Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) pusat mengeluarkan pernyataan mendukung larang tersebut karena pembentukan barisan itu secara fisik akan meningkatkan perpecahan dikalangan rakyat.⁷

Tidak berhasilnya membentuk barisan Soekarno, maka pada tanggal 20 Januari tahun 1966 Presiden Soekarno kembali memberi komando untuk membentuk barisan Pembela Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Pihak yang tidak senang terhadap Tritura menghasut masa Palang Merah Indonesia PMI/Front Marhaenis Ali Soerachman Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk membalas aksi-aksi KAMI dengan perbuatan teror. Hanya dengan dukungan Front Pancasila dan ABRI perjuangan Tritura dapat diteruskan. Front Pancasila mengeluarkan pernyataan lima

⁷ Marwati Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), pp.545-546.

pasal pada tanggal 14 Februari 1966 yang pada pokoknya mendukung tritura dan menolok segala fitnahan yang diajukan kepada KAMI dan Front Pancasila.

Selanjutnya, Presiden Soekarno melakukan *reshuffle* kabinet. Ditegaskan oleh Presiden Soekarno *reshuffle* bukan karena perjuangan kesatuan-kesatuan aksi. Hasil *reshuffle* yang disebut “Kabinet Dwikora yang disempurnakan” ternyata sangat mengecewakan harapan rakyat Indonesia. Kabinet baru yang beranggotakan 102 Menteri diumumkan pada tanggal 21 Februari tahun 1966. Hal yang mencengangkan rakyat Indonesia ialah disingkirkannya tokoh-tokoh yang gigih menentang G30S/PKI, seperti Jendral A.H Nasution, Menteri Koordinator Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sebaliknya, Presiden Soekarno mengangkat sejumlah orang yang diragukan i'tikad baiknya yang diindikasikan terlibat dalam G30S/PKI, seperti Ir. Surachman dan Oei Tjoe Tat, S.H. Tidak mengherankan jika para mahasiswa memberi nama Kabinet ini dengan nama Kabinet Gerakan 30 September (GESTAPU) atau “Kabinet 100 Menteri” karena jumlah anggotanya 100 orang lebih.⁸

Keputusan presiden Soekarno untuk merombak kabinetnya mula-mula ditanggapi secara positif oleh seluruh kalangan masyarakat. Masyarakat pada Tanggal 21 Februari tahun 1966 sedang dilanda kegelisahan berhubung dengan demonstrasi-demonstrasi secara terus-menerus yang dilancarkan oleh generasi muda khususnya, anggota-anggota parpol dan ormas non komunis pada umumnya dengan harapan adanya kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno sebagai tanda akan

⁸ Marwati Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI.*, p.546.

berakhirnya aksi-aksi perlemen jalanan. Tetapi kebijakan Presiden ini justru merupakan bensin yang disiramkan kepada api yang sedang berkobar dimana-mana.⁹

Upacara pelantikan menteri-menteri Kabinet Dwikora “yang disempurnakan” dilangsungkan pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Personalia susunan kabinet yang terdiri dari puluhan kursi menteri itu diumumkan oleh Presiden pada tanggal 22 Februari 1966. Tidak seorangpun anggota masyarakat yang mampu berpikir, tercengang mendengarkan Presiden mengumumkan susunan dalam persidangan kabinet 100 menteri. Demonstrasi besar yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar, aksi demonstran yang terbesar sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia menentang keputusan kepala negara yaitu Ir. Soekarno. Sejak subuh dini hari pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Puluhan, ratusan, ribuan mahasiswa sudah merayap dari kampus-kampus berlari-lari dijalanan. Mereka bergerombol-gerombol menempati tiap perempatan dan sepanjang simpang jalan yang strategis, menghadang lalu lintas dan mengadakan aksi mengempesi ban mobil. Lalu lintas diseluruh Jakarta macet total, menyebabkan sebagian besar kegiatan demonstrasi dan instansi-instansi pemerintah maupun swasta lumpuh total. Sambil berbaris memenuhi jalanan para demonstran meneriakkan yel-yel “Bubarkan PKI” , “bersihkan Kabinet-kabinet dari menteri gestapu dan orang-orang yang tidak konsisten terhadap janjinya dan turunkan

⁹ Soerejo, *G-30-S/PKI dan Apa Peran Bung Karno Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai...*, p. 260.

harga barang. Pasukan pengawal Istana kepresidenan dari Resimen Cakrabirawa yang sudah diperkuat dengan senjata siap menyambut para demonstran.¹⁰

Tanggal 10 Januari tahun 1966 merupakan momentum sejarah yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya sekaligus melakukan koreksi atas berbagai kekeliruan yang dibuat dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Meningkatnya aksi-aksi mahasiswa, pemuda dan pelajar mendapat dukungan nyata dari masyarakat. Kemudian lahirlah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Serjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), serta aksi lainnya. Mereka yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan aksi inilah yang oleh masyarakat diberikan nama Angkatan 66, yang berintikan mahasiswa, pelajar dan pemuda. Lahirnya KAPPI pada tanggal 9 Pebruari 1966 merupakan suatu proses yang panjang, dan tidak mudah, pada masa pra G30S/PKI organisasi pelajar yang non afiliasi dan cukup berpengaruh hanya Pelajar Islam Indonesia (PPI), dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Pancasila. Maka dalam pembentukan KAPPI dua organisasi ini mempunyai peran sangat besar.¹¹

Demikian pula halnya KAPI yang lahir di Kota Bandung, juga mempunyai jalan yang berliku dan semangat yang tinggi. Sejak dibentuknya Panitia Persiapan

¹⁰ Soerejo, *G-30-S/PKI dan Apa Peran Bung Karno Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai..*, pp. 260-261.

¹¹ Naim, *Angkatan 66 dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa "Meluruskan History Bangsa Demi Generasi" ...*, p.81

Kesatuan Aksi Pelajar SLTA untuk mendukung perjuangan mahasiswa Indonesia. Tokoh PII Udin Koswara menginginkan agar pelajar SLTA bergabung dengan KAPPI, sedangkan yang lainnya Thomas Sitepu dan Timorason menghendaki lain. Mereka meminta bantuan kepada ketua Dewan Mahasiswa UNPAD Sugeng Saryadi. Dalam pertemuan pada tanggal 7 Maret tahun 1966 bertempat di gedung Universitas Pajajaran Bandung terbentuklah KAPI.¹²

C. Aksi Turun ke Jalan

Pada hari jum'at tanggal 7 Januari tahun 1966 beberapa kelompok mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan berdiskusi secara serius tentang kenaikan harga bus Rp. 200 menjadi Rp, 1000 yang merupakan dampak kenaikan BBM pada saat terjadi krisis ekonomi terjadi suatu kegelisahan dalam dunia mahasiswa, khususnya pembicaraan-pembicaraan terakhir tentang situasi KAMI (Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) mahasiswa-mahasiswa pada saat itu sudah tidak tahan lagi untuk hidup karena harga-harga melambung tinggi. Dan mereka menafsirkan bahwa politik kenaikan harga dari pemerintah adalah usaha dari sementara menteri untuk mengalihkan perhatian rakyat dari fokus penganyangan G-30-S menjadi soal-soal kenaikan harga ke dalam isu-isu ekonomi. Beberapa waktu yang lalu pada tanggal 6 Januari tahun 1966 para mahasiswa menemui Kas Kodam Kol. Witono untuk membicarakan tentang perkembangan isu-isu ekonomi, mereka para mahasiswa KAMI merencanakan untuk mengadakan aksi-aksi masa atau (turun

¹² Naim, *Angkatan 66 dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa 'Meluruskan History Bangsa Demi Generasi' ...*, p.83.

kejalan) untuk menduduki pompa-pompa bensin dan melarang pengendara-pengendara mobil membeli bensin. Disamping itu ada beberapa puluhan mahasiswa yang merencanakan memblok di jalan Kereta Api agar lalulintas kereta api juga macet.

Tetapi ketika Kolonel Witono diberitahukan rencana ini sangat marah. Kalau kalian melakukan ini, maka fokus perhatian rakyat akan pindah dan soal pengganyangan PKI hanya akan menjadi soal yang kedua.¹³

Pada tanggal 20 Oktober tahun 1965 Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Mayor Djenderal Syarif Thayeb mengumpulkan berbagai Organisasi Mahasiswa untuk membentuk suatu organisasi yang dapat menghimpun semua elemen organisasi kemahasiswaan agar para aktifis Mahasiswa menjadi lebih terkodiner dan lahirlah organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tanggal 10 Januari tahun 1966 Masehi, KAMI melancarkan demonstrasi dengan beberapa tuntutan, yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), *reshuffle* Kabinet Dwikora dan Turunkan Harga. Aksi ini kemudian diperingati sebagai hari Kebangkitan Mahasiswa. Tiga hari setelah itu tuntutan tersebut pemerintah daerah Jakarta mengumumkan penurunan tarif angkutan Bus dari Rp. 1000 jadi Rp. 200, penurunan harga minyak sebesar 50 persen pada tanggal 15 Januari 1966, dan pembubaran partai PKI pada tanggal 11 Maret 1966. Gerakan Kesatuan Aksi

¹³ Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran* (Jakarta: LP3ES, 2011), pp.123-124.

Mahasiswa KAMI ini dikenal dengan angkatan 66 yang dipelopori oleh Cosmas Batubara, Jamroni, Marye Muhammad, Ismut Hadad dan Nano Karim.¹⁴

Para mahasiswa ada yang mendatangi pompa-pompa bensin dan memaksa merek agar menjual Rp 250 perliter. Akibatnya banyak pompa bensin yang tutup, sehingga pada pompa bensin yang buka terlihat deretan panjang mobil yang antri membeli bensin. Pada tanggal 15 Januari tahun 1966. Presiden Soekarno turun tangan mengundang para wakil mahasiswa untuk menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Bogor. Kepada para mahasiswa Bung Karno berjanji akan memerintahkan para menteri untuk memikirkan kembali peraturan-peraturan ekonomi yang telah ditetapkan. Akhirnya sidang mengambil keputusan menurunkan harga bensin dan tarif angkutan, terutama angkutan bus.¹⁵

Pada tanggal 2 Mei tahun 1966 ribuan mahasiswa memenuhi gedung-gedung dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) untuk menyampaikan sebuah Nota Politik. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) kepada DPR-GR yang pada tanggal 2 Mei tahun 1966 sedang mengadakan Sidang Pleno Terbuka untuk memulai persidangan keempat tahun 1965-1966. Nota Politik tersebut dibacakan oleh ketua Presidium Kami Pusat. Komnas Batu Bara di depan sidang yang untuk keperluan itu telah diskors oleh ketua sidang, H. Achmad Sjaichu. Nota Politik mengupas penyelewengan-penyelewengan konstitusional dalam masa-

¹⁴ Zaenal Abidin, *Kapita Selekta Sejarah* (Serang: Lembaga Penelitian IAIN “SMH” Banten, 2011), pp. 192-194.

¹⁵ Soerejo, *Siapa Menabur Angin Akan Menunai Badai G-30-S/PKI dan Apa Peran Bung Karno...* pp.264.

masa Orde Lama dan menuntut pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dikemukakan pula dalam Nota tersebut bahwa MPRS yang direncanakan bersidang pada tanggal 12 Mei 1966. kemudian diundurkan, supaya memberikan tugas kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan sesuai dengan surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret tahun 1966.

Nota Politik Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tersebut juga tidak membenarkan pendapat bahwa lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Perwakilan Agung (DPA) tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum karena pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila MPRS dan DPR-GR tidak dianggap sah pada tanggal 12 Mei 1966. dibubarkan PKI, semua kekuasaan sepenuhnya akan jatuh ke tangan Presiden Soeharto. Sidang pleno DPR-GR pada hari itu telah menandakan pembicaraan anggota DPR-GR Dachlan Ranuwihardjo S.H., yang antara lain mengusulkan agar untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten, pimpinan DPR-GR tidak ditunjuk oleh Presiden Soeharto, tetapi dipilih oleh anggota-anggota DPR-GR sendiri. Juga diusulkan agar pimpinan DPR-GR tidak menjadi anggota Kabinet.¹⁶

¹⁶ Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III* (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1975), p.96.

Setelah mendengar pendapat golongan-golongan mengenai usul itu sidang Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) pada tanggal 12 Mei tahun 1966 tersebut mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Pimpinan DPR-GR Demisioner.
2. Mengangkat *care taker* pimpinan DPR-GR yang terdiri dari H. A. Sjaichu, Laksamana Muda (L) Mursalin Daeng Mamanggung, dan Brigadir Dr. Sjarif Thajeb.

Kemudian pada tanggal 17 Mei 1966 DPR-GR memilih pimpinannya yang terdiri atas:

Ketua : H.A. Sjaichu dari golongan Islam, Wakil Ketua : Mohammad Isnanaeni dari golongan Nasionalis, Wakil Ketua: Drs. Ben Mang Reng Say dari golongan Kristen/Khatolik, Wakil Ketua: Laksamana Muda (L) Mursalin Daeng Mamanggung dari golongan Karya dan Wakil Ketua : Brigadir Jenderal Dr. Sjarif Thajeb dari golongan Karya.¹⁷ Para pemimpin DPR-GR yang baru yang dipilih oleh dan di antara anggota DPR-GR sendiri pada tanggal 17 Mei 1966. DPR-GR memegang peranan yang penting dalam perjuangan Orde Baru. dan Bagan Susunan Kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia.¹⁸ Maka G-30-S dihancurkan dan PKI dilarang, begitu juga penyiaran ajaran-ajaran komunis, barulah angkatan pembangun benar-benar dapat berdiri yang dibawah pimpinan Jenderal Soeharto.¹⁹

¹⁷ Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III...*, pp.96-97.

¹⁸ Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III...*, p.99.

¹⁹ Aristdes Katopo, *80 tahun Bung Karno*, (Jakarta; sinar harapan, 1981), p. 100.